

PORTOFOLIO AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, M.Pd.

Mega Metalia, S.E, M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun oleh:

Kelompok 12

Eri Zenta Zikra Birama P 22313031040

Elsa Triananda 2313031053

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Analisis Artikel Media Massa Online

Artikel 1

Judul: Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Media: Kompasiana

Tahun: 2023

Analisis Isi:

Artikel ini menjelaskan konsep dasar akuntansi sektor publik serta urgensinya dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Penulis menekankan bahwa dana publik yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Akuntansi sektor publik diposisikan sebagai alat kontrol dan pengawasan yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat.

Lebih lanjut, artikel ini menguraikan prinsip-prinsip utama akuntansi sektor publik, seperti transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dan pertanggungjawaban. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana komunikasi publik.

Artikel ini juga menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung praktik akuntansi sektor publik modern. Penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital dinilai mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, penerapan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik.

Komentar dan Relevansi:

Artikel ini relevan karena menggunakan bahasa populer dan mudah dipahami, sehingga cocok sebagai bacaan pengantar bagi mahasiswa. Kelebihannya terletak pada kemampuan penulis mengaitkan konsep akuntansi dengan kepentingan masyarakat luas. Namun, artikel ini masih bersifat konseptual dan belum banyak menyajikan contoh empiris atau data kuantitatif.

Artikel 2

Judul: Regulasi dan Standar Akuntansi Publik

Media: Kompasiana

Tahun: 2023

Analisis Isi:

Artikel ini membahas pentingnya regulasi dan standar dalam akuntansi sektor publik. Penulis menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman utama dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. SAP di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengadopsi basis akrual.

Artikel ini juga mengaitkan SAP dengan standar internasional, yaitu International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi sektor publik di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti perkembangan global. Standarisasi ini penting agar laporan keuangan pemerintah dapat dibandingkan lintas waktu dan lintas negara.

Komentar dan Relevansi:

Artikel ini memberikan pemahaman normatif yang kuat mengenai kerangka regulasi akuntansi sektor publik. Kelemahannya adalah minimnya pembahasan mengenai tantangan implementasi SAP di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi.

Artikel 3

Judul: Masa Depan Akuntansi Sektor Publik Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Media: Kompasiana

Tahun: 2024

Analisis Isi:

Artikel ini mengangkat isu yang relatif baru, yaitu akuntansi sektor publik berbasis syariah. Penulis berpendapat bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan akuntansi publik syariah mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan transparansi dinilai sejalan dengan tujuan akuntansi sektor publik.

Namun demikian, artikel ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti belum adanya regulasi khusus, keterbatasan SDM, dan dominasi sistem akuntansi konvensional. Transisi menuju sistem syariah membutuhkan komitmen pemerintah, dukungan akademisi, serta kesiapan institusi publik.

Komentar dan Relevansi:

Artikel ini memberikan perspektif alternatif dan inovatif dalam kajian akuntansi sektor publik. Nilai tambahnya terletak pada upaya mengintegrasikan prinsip agama dengan tata kelola keuangan negara. Artikel ini relevan untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai variasi pendekatan dalam akuntansi publik.

Analisis Jurnal Nasional

Jurnal Nasional 1

Judul: Persepsi Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan

Analisis Isi (Diperluas):

Jurnal ini mengkaji secara mendalam bagaimana persepsi terhadap akuntansi sektor publik berkembang di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan dan praktik pemerintahan.

Penulis menyoroti adanya kecenderungan penyempitan makna akuntansi sektor publik yang sering kali disamakan dengan akuntansi pemerintahan. Padahal, secara konseptual, akuntansi sektor publik memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mencakup seluruh organisasi yang mengelola dana publik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, termasuk lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, partai politik, perguruan tinggi negeri, hingga organisasi nirlaba.

Lebih lanjut, jurnal ini menegaskan bahwa pemahaman yang keliru terhadap ruang lingkup akuntansi sektor publik dapat berdampak pada praktik pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Jika akuntansi sektor publik hanya dipahami sebagai sekadar teknik pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah, maka aspek pertanggungjawaban publik, transparansi, dan demokrasi akan terabaikan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pendekatan konseptual yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dana publik yang berhak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipahami.

Dalam konteks pemerintahan daerah, jurnal ini menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban melalui standarisasi pelayanan publik yang ditetapkan oleh DPRD. Kepala daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan DPRD berperan sebagai pengawas dan penentu standar. Hubungan ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, laporan keuangan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial.

Komentar Analitis:

Jurnal ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami hakikat akuntansi sektor publik. Kelebihan utama jurnal ini terletak pada keberhasilannya mengaitkan konsep akuntansi dengan prinsip demokrasi dan pelayanan publik. Namun, karena bersifat konseptual, jurnal ini relatif minim data empiris sehingga lebih cocok digunakan sebagai referensi teoritis dan pengantar diskusi akademik.

Jurnal Nasional 2

Judul: Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Analisis Isi (Diperluas):

Jurnal ini bertujuan memetakan perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia melalui metode *charting the field*. Penulis menganalisis ratusan artikel dari jurnal terakreditasi nasional dalam rentang waktu tertentu untuk mengidentifikasi topik dan metode penelitian yang paling dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik akuntansi keuangan sektor publik masih mendominasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pusat.

Dominasi topik akuntansi keuangan menunjukkan bahwa isu transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah, seperti

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, keterlambatan pelaporan, serta kualitas informasi yang belum optimal. Di sisi lain, jurnal ini juga mengungkap bahwa topik-topik lain seperti perpajakan sektor publik, sistem akuntansi, dan akuntansi manajemen publik masih relatif kurang diteliti.

Dari sisi metode penelitian, jurnal ini mencatat bahwa pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis arsip merupakan metode yang paling sering digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia masih berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel, sementara pendekatan kualitatif yang menggali proses dan konteks implementasi kebijakan masih terbatas.

Komentar Analitis:

Jurnal ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan kecenderungan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. Temuannya dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi topik yang masih jarang dikaji, seperti akuntansi manajemen sektor publik dan evaluasi kebijakan fiskal. Kelemahannya, jurnal ini lebih bersifat deskriptif sehingga tidak secara langsung memberikan solusi atas permasalahan yang diidentifikasi.

Jurnal Nasional 3

Judul: Akuntansi pada Organisasi Sektor Publik

Analisis Isi (Diperluas):

Jurnal ini membahas karakteristik akuntansi pada organisasi sektor publik serta perbedaannya dengan akuntansi sektor swasta. Penulis menegaskan bahwa tujuan utama akuntansi sektor publik bukanlah pencapaian laba, melainkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, informasi keuangan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan kinerja pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan.

Salah satu fokus utama jurnal ini adalah penerapan basis akrual dalam akuntansi sektor publik. Basis akrual dipandang mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah dibandingkan basis kas. Dengan basis akrual, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dapat diakui secara lebih tepat, sehingga meningkatkan kualitas informasi bagi pengambilan keputusan.

Namun demikian, jurnal ini juga mengungkap berbagai tantangan dalam penerapan basis akrual, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan sistem informasi, serta resistensi terhadap perubahan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan perubahan budaya organisasi.

Komentar Analitis:

Jurnal ini relevan sebagai referensi praktis dan konseptual mengenai implementasi akuntansi sektor publik. Pembahasannya cukup komprehensif dan kontekstual dengan kondisi Indonesia.

Jurnal ini sangat berguna untuk memahami tantangan nyata yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik.

Jurnal Nasional 2

Judul: Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Analisis Isi:

Penelitian ini memetakan perkembangan riset akuntansi sektor publik di Indonesia selama beberapa tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa topik akuntansi keuangan publik masih mendominasi, sementara topik lain seperti perpajakan dan sistem akuntansi relatif kurang mendapat perhatian.

Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian akuntansi sektor publik masih berfokus pada aspek pelaporan, belum banyak mengeksplorasi dimensi manajerial dan kebijakan publik. Hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya.

Jurnal Nasional 3

Judul: Akuntansi pada Organisasi Sektor Publik

Analisis Isi:

Jurnal ini meninjau praktik akuntansi pada berbagai organisasi sektor publik dan menekankan perbedaan mendasar dengan sektor swasta. Basis akrual dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah.

Analisis Jurnal Internasional

Jurnal Internasional 1

Judul: Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks

Analisis Isi (Diperluas):

Jurnal ini membahas keterkaitan antara tata kelola teknologi informasi (IT governance) dan penerapan prinsip-prinsip good governance di sektor publik. Penulis berargumen bahwa transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Framework IT governance seperti ISO/IEC 38500 dipandang sebagai alat strategis untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi selaras dengan tujuan organisasi publik.

Melalui studi kasus pada institusi pemerintah, jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola TI yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kualitas layanan publik. Teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, sistem informasi yang transparan juga membuka peluang pengawasan publik yang lebih luas.

Jurnal ini menekankan bahwa keberhasilan penerapan IT governance tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh komitmen pimpinan, budaya organisasi, dan kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab. Tanpa dukungan manajemen puncak, penerapan tata kelola TI berpotensi menjadi sekadar formalitas.

Komentar Analitis:

Jurnal ini memberikan wawasan penting mengenai peran teknologi dalam mendukung akuntansi sektor publik modern. Meskipun studi kasusnya terbatas, temuan jurnal ini relevan untuk dijadikan rujukan bagi pemerintah yang sedang mengembangkan sistem informasi keuangan berbasis digital.

Jurnal Internasional 2

Judul: Harmonizing Budgeting and Accounting: The Case of Italy

Analisis Isi (Diperluas):

Jurnal ini mengkaji reformasi keuangan publik di Italia yang berfokus pada upaya harmonisasi antara sistem penganggaran dan sistem akuntansi. Penulis menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara kedua sistem tersebut dapat menyebabkan inkonsistensi data, kesulitan evaluasi kinerja, serta rendahnya kualitas pengambilan keputusan fiskal. Oleh karena itu, harmonisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Reformasi ini ditandai dengan peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas menuju basis akrual. Perubahan ini memungkinkan pemerintah memperoleh informasi keuangan yang lebih lengkap, termasuk mengenai aset dan kewajiban jangka panjang. Namun, jurnal ini juga menyoroti berbagai tantangan implementasi, seperti kebutuhan pelatihan aparatur, perubahan prosedur administratif, dan resistensi birokrasi.

Penulis menegaskan bahwa harmonisasi budgeting dan accounting bukan sekadar reformasi teknis, tetapi juga reformasi institusional dan manajerial. Keberhasilan reformasi sangat bergantung pada dukungan politik dan keberlanjutan kebijakan.

Komentar Analitis:

Meskipun berfokus pada konteks Italia, jurnal ini memberikan pembelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, yang sedang melakukan modernisasi sistem keuangan publik. Temuan jurnal ini relevan untuk memahami bahwa reformasi akuntansi sektor publik memerlukan pendekatan jangka panjang dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Laporan posisi keuangan Bank Mandiri menunjukkan struktur aset yang didominasi oleh penyaluran kredit serta kepemilikan surat berharga negara. Kondisi ini mencerminkan peran

Bank Mandiri dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan kebijakan pemerintah. Dari sisi kewajiban, dana pihak ketiga menjadi sumber pendanaan utama, yang menandakan tingginya kepercayaan masyarakat. Sementara itu, ekuitas yang kuat berasal dari modal negara dan laba ditahan, sehingga bank memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga stabilitas keuangan dan menanggung risiko.

Pada laporan laba rugi, pendapatan Bank Mandiri terutama bersumber dari pendapatan bunga dan pendapatan berbasis jasa. Beban operasional dan beban bunga masih dapat dikelola secara efisien, sehingga bank mampu mencatatkan laba bersih yang stabil. Dalam perspektif sektor publik, laba ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi kepada negara melalui dividen dan pajak.

Dari sisi arus kas, aktivitas operasional Bank Mandiri menunjukkan arus kas positif yang mencerminkan kelancaran kegiatan utama perbankan. Arus kas investasi digunakan untuk penguatan aset produktif dan pengembangan layanan perbankan, sedangkan arus kas pendanaan berkaitan dengan pembayaran dividen kepada pemerintah serta penguatan struktur permodalan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Bank Mandiri mencerminkan pengelolaan keuangan sektor publik yang sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.